

**LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)
BADAN PENDAPATAN DAERAH**



**KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2018**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam era globalisasi, komitmen pemerintah untuk mewujudkan Good Government dan Clean Government semakin kuat. Hal tersebut sesuai dengan harapan stake holders Pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat internasional dan termasuk rakyat pada umumnya terhadap plenggaraan pemerintahan yang efisien, profesional, transparan, akuntabel dan bebas KKN. Tuntutan tersebut telah diakomodasikan dalam ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan penyelenggara Pemerintahan pusat dan daerah untuk menyusun LAKIP setiap akhir tahun anggaran mulai tahun anggaran 2000.

Dilandasi kesadaran yang sangat mendalam akan pentingnya akuntabilitas publik baik bagi manajemen maupun bagi stakeholders, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2018 yang mengacu kepada Pedoman Penyusunan LAKIP yang diterbitkan oleh LAN sebagai laporan akuntabilitas atas hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018. Laporan Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang mengungkapkan keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai sasaran organisasi. Di samping itu, LAKIP juga mengungkapkan faktor pendukung keberhasilan, hambatan pencapaian sasaran serta strategi perbaikan di masa mendatang.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa **Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang telah berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan**. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari persentase capaian hasil kinerja sasaran yaitu tingkat capaian kinerja sasaran secara keseluruhan adalah sebesar **99,03%** yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran. Dari 7 sasaran yang ditetapkan, tidak semuanya mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan sasaran tersebut tak lepas dari hasil kerja keras segenap perangkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang serta partisipasi seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan cita-cita daerah.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang telah menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan, peningkatan kemampuan pengelola kegiatan, penyempurnaan implementasi anggaran berbasis kinerja dan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan.

Kami menyadari bahwa informasi yang disajikan dalam LAKIP belum sepenuhnya dapat memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan. Karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LAKIP di masa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum LAKIP

Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang bersih (Good Governance) yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, untuk itu diperlukan pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat dilaksanakan dan berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari KKN dan bertanggung jawab.

Masyarakat semakin kritis, cerdas dan sadar akan hak-haknya sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap kelangsungan organisasi. Menghadapi hal tersebut, maka organisasi publik harus mengubah paradigma pertanggungjawaban atas wewenang yang diembannya. Perubahan tersebut menghendaki agar sumber daya yang dikelola oleh organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan akuntabel.

Seiring dengan itu, perkembangan manajemen modern telah membuktikan bahwa keterwujudan *good governance* dalam sebuah organisasi akan menjadi *competitive advantage* bagi penyelenggara di mata publik. Di sisi lain, terselenggaranya *good governance* merupakan indikator terciptanya *clean government*. Sebagai salah satu pilar *good governance*, pertanggungjawaban (*accountability*) menjadi syarat mutlak munculnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan aktivitas organisasi.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang sebagai sebuah organisasi publik menyadari sepenuhnya akan kondisi di atas. Agar kerangka kegiatan pembangunan dapat terarah, terpadu dan menyeluruh dan berlangsung secara berkesinambungan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang telah mengembangkan mekanisme pertanggungjawaban publik dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP yang disusun merupakan pertanggungjawaban tahunan atas Rencana Strategik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 yang juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan.

2. Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu kepada Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya PP No. 18 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dimana memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota untuk menyusun dan menetapkan organisasi dan perangkat daerah sesuai kebutuhan, serta ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No.11 tahun 2016 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Enrekang, diantaranya terbentuknya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 55/XII/2016 BAPENDA mempunyai wewenang, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Wewenang

- Melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan Perumusan Kebijakan Umum dibidang Pendapatan Daerah.
- Penyelenggaraan dan Pembinaan serta pelaksanaan bidang Pendapatan.
- Penyelenggaraan dan pembinaan pelaksanaan Perbendaharaan Penerima.
- Penyelenggaraan dan pembinaan serta pelaksanaan Benda Berharga.
- Penyelenggaraan dan pembinaan serta pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Penyelenggaraan penerimaan pendapatan Daerah.
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

2. Tugas Pokok

Tugas pokok BAPENDA Kabupaten Enrekang adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten di bidang Pendapatan Daerah serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

3. Fungsi

- Menyusun rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah baik jangka panjang, menengah dan jangka pendek.
- Penyelenggaraan urusan kesekretariatan yang meliputi urusan umum, kepegawaian dan urusan keuangan.
- Perumusan kebijakan secara teknis bidang Pendapatan.
- Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pendaftaran, bidang pendataan, bidang penetapan, bidang pembukuan pelaporan dan bidang pembinaan dan pengawasan.
- Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai lingkup tugasnya.
- Penyelenggara administrasi dan pelaporan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja BAPENDA sebagai berikut :

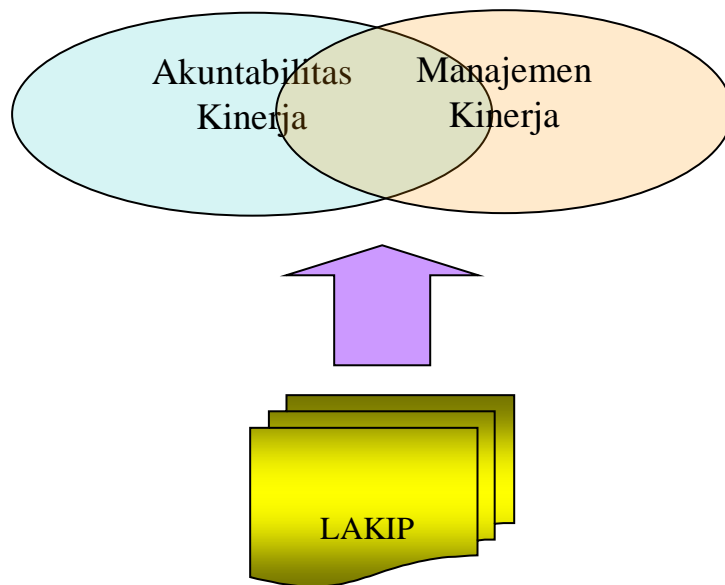
- Kepala Badan
- Sekretaris Badan dengan 3 sub bagian
- 4 Kepala Bidang dengan 8 sub bidang.

3. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem AKIP bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan Kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan stratejik dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Stratejik yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Unit Kerja yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dilaporkan dan dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. **Pertama**, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Badan pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan *stakeholders* (DPRD dan masyarakat). **Kedua**, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serketariat sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

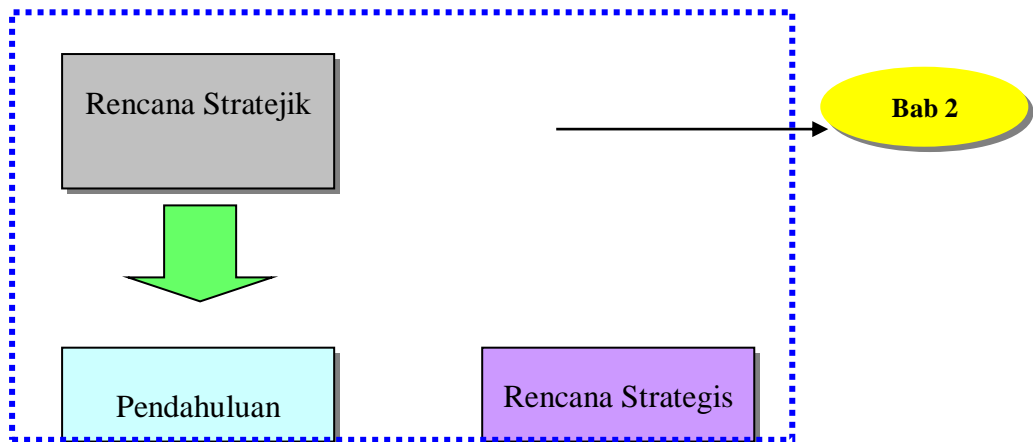


Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Badan pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 mencakup hal-hal berikut ini:

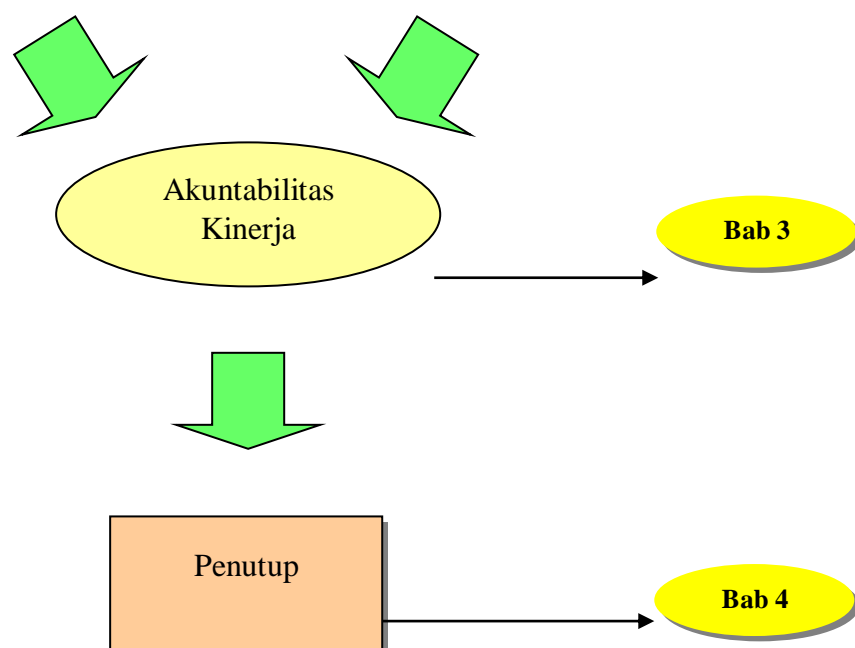
- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2018 sebagai sarana pertanggung jawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2018. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik telah dicapai selama tahun 2018
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2018 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Badan pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang sebagai upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja unit Kerja kedepan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

4. Sistematika LAKIP 2018

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang selama tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) 2018 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2018 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini.



Referensi
Bab 1/2



Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP 2018 ini

Bab II – Rencana Strategik, menjelaskan muatan rencana strategik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang periode 2014-2018 dan rencana kinerja untuk tahun 2018.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategik untuk tahun 2018.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2018 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN STRATEJIK

Sebagai sebuah organisasi sektor publik, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik Badan pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya, sasaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tiap tahunnya teruang dalam Formulir Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan lampiran dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2018 ini.

1. Rencana Strategik

Rencana Strategik Badan pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan.

Di samping itu, Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan menjamin tercapainya sasaran strategik pembangunan 5 (lima) tahun mendatang. Bagi manajemen Badan pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, Renstra dipandang sebagai:

- Alat bantu bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi bagi Badan pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi.
- Alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Renstra sebagai alat bagi manajemen, memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategik. Dalam dokumen Renstra Badan pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan/sasaran strategik serta strategi pencapaiannya (kebijakan dan program).

A. VISI DAN MISI

1) Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang dijabarkan sebagai berikut:

**TERWUJUDNYA OPTIMALISASI PENERIMAAN DAERAH UNTUK
MEMBANGUN ENREKANG MAJU AMAN DAN SEJAHTERA
MENDORONG TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN SUATU
PEMERINTAHAN YANG BAIK
(*GOOD GOVERNANCE*)**

2) Misi

Untuk memenuhi visi tersebut, dimencanangkan misi. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik.

Dengan pernyataan Misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya lebih dalam.

Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. MENGOPTIMALKAN SELURUH PENDAPATAN DAERAH BERDASARKAN POTENSI YANG DIMILIKI.**
- b. MENINGKATKAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN PENERIMAAN KEUANGAN DAERAH SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.**

c. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR AGAR PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN PENERIMAAN KEUANGAN DAERAH DAPAT BERJALAN SECARA EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.

Makna yang terkandung dalam masing-masing misi yang telah kami tetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. MISI PERTAMA:

“MENDORONG PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN ENREKANG.

Untuk lebih meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Daerah maka semua Potensi yang ada harus dikelola dengan baik melalui Sumber Daya yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang.

b. MISI KEDUA:

“MENDORONG TERCIPTANYA PENGENDALIAN PENGELOLAAN PENERIMAAN KEUANGAN DAERAH SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.

Badan pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, berkomitmen untuk meningkatkan Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Badan Pendapatan daerah dalam rangka upaya terciptanya pengendalian pengelolaan penerimaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

c. MISI KETIGA

“MENDORONG TERCIPTAYA PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN PENERIMAAN KEUANGAN DAERAH SECARA EFEKTIF,EFISIEN DAN AKUNTABEL.

Untuk mewujudkan pengelolaan penerimaan keuangan Daerah yang baik, maka diperlukan kapasitas pengelola yang memadai dalam rangka melakukan Monitring. Evaluasi dan pengendalian Administrasi penerimaan keuangan daerah.

B. Tujuan/Sasaran

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang telah menetapkan tujuan strategik berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran strategik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran strategik yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengembangkan koordinasi/komunikasi pengelola penerimaan keuangan daerah.
2. Meningkatkan kualitas implementasi sistem pengelolaan penerimaan keuangan daerah yang terintegrasi ditingkat daerah, provinsi maupun pusat.
3. Mengembangkan sistem pendataan, Evaluasi, pelaporan, informasi dan pengendalian Pengelolaan Administrasi penerimaan keuangan daerah.
4. Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan PBB dan PAD.
5. Menyusun Anggaran Pendapatan Kabupaten Enrekang.
6. Menyusun Anggaran perubahan Penerimaan dalam satu Tahun Anggaran.
7. Menyusun Laporan Penerimaan Daerah dalam satu Tahun Anggaran.
8. Menyusun laporan pertanggungjawaban Penerimaan Daerah dalam satu Tahun Anggaran.
9. Melakukan inventarisasi pengelolaan Administrasi Penerimaan keuangan Pemerintah daerah.
10. Melakukan Monitoring Penerimaan daerah.
11. Memberdayakan kapasitas kelembagaan dan manajemen BAPENDA Kabupaten Enrekang.

Demikian pula halnya dengan sasaran organisasi adalah pernyataan tentang hal-hal yang diharapkan oleh setiap unit organisasi dalam peranannya terhadap pencapaian Visi dan Misi organisasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka sasaran diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan daerah terutama dari komponen pendapatan asli daerah yakni pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Meningkatkan Efektifitas penerimaan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.
3. Meningkatkan kualitas, wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Cara Mencapai Tujuan

1) Strategi

Strategi pencapaian tujuan menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian hasil yang konsisten dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor yang sangat penting dalam proses perencanaan strategik. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya yang meliputi penetapan kebijakan dan program. Kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak terkait dan ditetapkan untuk menjadi pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah maupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Pemerintah Daerah. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran tertentu. Kemudian, kegiatan yang ingin dilaksanakan dalam tiap tahun akan dijelaskan dalam Formulir Rencana Kinerja Tahunan (*Yearly Performance Plan*).

2) Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu ditetapkan kebijakan. Kebijakan ditetapkan untuk memberikan petunjuk, arahan, prinsip dasar, rambu-rambu dan sinyal penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Elemen penting dalam memilih kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijaksanaan yang cocok. Kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Membangun komunikasi pengelola Penerimaan Daerah yang lebih berkualitas dengan OPD, baik Kabupaten, Provinsi dan Pusat untuk menjamin integrasi, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang akan tertuang dalam beberapa dokumen pengelolaan penerimaan keuangan daerah.
- b. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan penerimaan keuangan daerah yang dapat diakses oleh semua elemen.

- c. Mengembangkan Kualitas SDM pengelola Penerimaan Keuangan daerah.
- d. Memantapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Administrasi penerimaan keuangan daerah.
- e. Meningkatkan kapasitas dan keseimbangan kerjasama pengelola penerimaan keuangan daerah antara lembaga pemerintah daerah dan non pemerintah.
- f. Memberdayakan sistem kelembagaan dan kompetensi aparatur BAPENDA Kabupaten Enrekang dalam pengelolaan penerimaan keuangan daerah yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai.
- g. Mengembangkan kajian dan penelitian sebagai bahan dalam formulasi penerimaan keuangan dan kebijakan operasional pembangunan daerah.

3) Program

Program pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi yang sekaligus merupakan penjabaran rinci tentang langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan termasuk didalamnya proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang akan digunakan.

Program yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan administrasi perkantoran.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- c. Peningkatan disiplin aparatur.
- d. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.
- e. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- f. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.
- g. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah.

4) Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategik maka disusun suatu Rencana Kinerja Tahunan (*Yearly Performance Plan*). Rencana kinerja tersebut merupakan penjabaran target kinerja yang akan dicapai dalam satu periode pelaksanaan. Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding dalam mengukur tingkat keberhasilan/kegagalan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana kinerja tahun 2018 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses pelayanan Badan pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang diharapkan dapat berjalan dengan baik.

Sasaran strategik tahun 2018, indikator kinerja dan target kinerja dapat disajikan pada tabel berikut:

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	Terciptanya pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Tersedianya jasa pelayanan Administrsai kantor.	%	100
		2	Tersedianya peralatan kantor	%	100
		3	Tersedianya Bahan Bacaan	%	100
		4	Terlaksananya Rapat Rapat koordinasi	%	100
		5	Terlaksananya pelelangan barang/jasa	%	100
		6	Terlaksananya Koordinasi dalam daerah	%	100
		7	Terlaksananya pengelolaan Adm Ktr	%	100.
		8	Tersedianya Jasa Komunikasi,air dan listrik	%	100
		9	Tersdianya komponen instalasi listrik	%	100
2	Terciptanya Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur.	1	Tersedianya Peralatan gedung kantor.	Unit	14
		2	Tesedianya kendaraan Dinas	Unit	2 Unit
		3	Terawatnya secara kontinyu gedung kantor	%	100
		4	Terawatnya secara kontinyu peralatan gedung kantor	%	100
		5	Terawatnya secara kontinyu kendaraan dians operasional	Unit	11
3	Terciptanya Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Tersedianya keseragaman Pakaian Dinas PNS	Psg	112
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Meningkatnya Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Tehnis tugas dan Fungsi	Orang	26
5	Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	1	Tersedianya LAKIP SKPD	Dok	1
		2	Tersedianya laporan keuangan Akhir Tahun.	Dok	1
		3	Tersedianya laporan realisasi fisik dan keuangan	Dok	1
6	Singkronisasi Perencanaan dan penganggaran	1	Tersusunnya RKA OPD	Dok	1
		2	Tersusunnya DPA OPD	Dok	1

	Pengelolaan Keuangan.	3	Tersusunnya Renja OPD	Dok	1
7	Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah	1	.Tersedianya sarana penagihan penerimaan Daerah	Blok	8.900
		2	Tersedianya Data PAD yang Akurat	%	100
		3	Terlaksananya penyuluhan perpajakan	%	100
		4	Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi pegawai	%	100
		5	Tersusunnya SPT Bulanan dan Tahunan .	%	100
		6.	Terlaksananya Bimbingan Tehnis Bendahara penerima OPD	OPD	25
		7	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Bagi Hasil pajak	%	100
		8.	Tercapaiannya realisasi penerimaan Daerah	Kecamatan	12
		9	Terselesainya permasalahan pajak dan retribusi daerah	%	100.
		10	Tersedianya data Objek pajak dan Retribusi daerah yang akurat	%	100
		11	Terciptanya peningkatan penerimaan daerah	%	15
		12	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD dan pengurusan program Pembangunan	%	100
		13	Tersedianya SKPD dan SKRD	%	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

LAKIP tahun 2018 bagi Badan pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas publik. Pengukuran capaian kinerja tahun 2018, berpedoman pada SK LAN Nomor 239/ IX / 6 / 8 / 2003 dengan terlebih dahulu menetapkan indikator-indikator kinerja, yaitu *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil). Sedangkan indikator *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak) belum bisa diukur pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kedua indikator tersebut tidak dapat diimplementasikan hanya pada satu kegiatan saja, akan tetapi sangat terkait dengan kegiatan lainnya. Selain itu, untuk pengukuran kedua indikator tersebut menggunakan metode penilaian tersendiri yang terkait dengan evaluasi kebijakan setelah terlebih dahulu membangun sistem pengumpulan data secara memadai.

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab jika dijumpai celah kinerja (*performance gap*) serta upaya-upaya perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana misi suatu organisasi telah diwujudkan.

Ikhtisar pengukuran kinerja keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran stratejik dapat dilihat pada Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Lampiran 2. Sedangkan pengukuran kinerja kegiatan dapat dilihat pada Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Lampiran 3.

2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Secara umum dari sasaran stratejik yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang tidak semua tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Ini terlihat dari capaian indikator sasaran target yang diharapkan tidak semuanya tercapai. Di sisi lain, keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran tak lepas dari keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing bagian organisasi.

a. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Strategik

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi.

Dari 7 (Tujuh) sasaran yang telah ditetapkan, tidak semuanya telah mencapai target kinerja yang diharapkan. Hal ini terlihat dari capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat *outcome*.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2018 mengadakan pengukuran capaian kinerja pada seluruh kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD. Dengan diterapkannya Anggaran Berbasis Kinerja, maka indikator kegiatan yang digunakan dalam pengukuran kinerja menggunakan sumber data dari Dokumen Anggaran Satuan Kerja. Realisasi capaian kinerja sasaran secara keseluruhan adalah sebesar 99,03% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Berdasarkan Rencana Strategik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang dan Rencana Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, maka capaian kinerja sasaran strategik secara kuantitatif dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran sesuai dengan rencana adalah sebagai berikut:

	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
-	Terlaksananya Pengelolaan administrasi keuangan dan perkantoran	%	100	99,72	99,72
-	Tersedianya jasa Komunikasi air dan listrik	%	100	93,16	93,16
-	Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	%	100	100	100
-	Tersedianya Komponen instalasi penerangan bangunan kantor	%	100	93,56	93,56

-	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	%	100	96,24	96,24
-	Terlaksananya Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	%	100	100	100
-	Terlaksananya pelelangan penagadaan barang dan Jasa	%	100	100	100
-	Terlaksananya koordinasi,konsolidasi dalam daerah	%	100	100	100
-	Lancarnya pelaksanaan tugas dan fungsi	%	100	99,99	99,99

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang di tahun 2018 telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran Meningkatnya Pengelolaan Penerimaan Keuangan Daerah yang Dilaksanakan Baik oleh Pemerintah Daerah di Tingkat Kabupaten maupun Pemerintah di Tingkat Kecamatan, Lurah dan Desa melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik.
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Penyediaan Komponen instalasi listrik penerangan bangunan
- Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
- Pelaksanaan pelelangan pengadaan barang dan Jasa.
- Koordinasi,Konsolidasi dalam daerah dan peninjauan lapangan.
- Pengelolaan Administrasi keuangan dan perkantoran.

Dari 8 (Sembilan) indikator kinerja, yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran tersebut 4 (Empat) indikator yang tidak mencapai target.

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik ditargetkan sebesar Rp 42.021.000,-namun yang telah terealisasi sebesar Rp.39.144.714,- atau 93,16 %.ini disebabkan karena Anggaran yang disediakan lebih besar dengan jumlah yang akan dibayarkan.sehingga tidak terealisaasi anggaran sebesar Rp.2.876.286,-(Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah Rupiah).
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik penerangan Bangunan Kantordi Targetkan sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) Namun yang terealisasi sebesar Rp.6.549.513,- (Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah) dengan

Prosentase 93,56, anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp 450.487,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang – Undangan ditargetkan sebesar Rp.20.200.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Namun yang terealisasi sebesar Rp.19.440.000,- (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Dengan Prosentase sebesar 96,24 % sehingga yang tidak terealisaasi kegiatan ini sebesar Rp 760.000.,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- Pengelolaan administrasi keuangan dan perkantoran, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.894.750.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Namun yang teralisasi sebesar Rp.894.627.500,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh dengan Prosentase 99,99 % sehinga yang terealisasi sebesar Rp.122.500 (Seratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus RupiahH)

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
- Tersedianya Mobiler Kantor	%	100	98,25	98.25
- Meningkatnya Perlengkapan Gedung Kantor	%	100	96,38	96,38
- Terwatnya Secara Kontinyu Gedung Kantor	%	100	100	100
- Terwatnya Secara Kontinyu Kendaraan Dinas	%	100	71,82	71,82
- Terwatnya Secara Kontinyu Peralatan Gedung Kantor	%	100	100	100

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran Terciptanya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai dan berkualitas melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pengadaan Mobiler.
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional.
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor.

Dari 5 (Lima) indikator kinerja, yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran tersebut ada semuanya tidak mencapai target yaitu:

- Pengadaan Mobiler yang dianggarkan sebesar Rp.196.800.000,- Namun yang terealisasi Sebesar Rp.192.367.000,- (98,25%) kegiatan ini tidak terealisasi secara keseluruhan karena harga Satuan yang ada pada DPA lebih besar dari harga satuan pada Dealer.
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.195.000.000,- Namun yang terealisasi sebesar Rp.186.000.000,- Kegiatan ini mampu menghemat anggaran sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) ini disebabkan karena harga pada DPA lebih besar dari harga pasar.
- Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional, kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.53.800.000,- namun yang direalisasikan sebesar Rp.38.424.686,- (71,82%). Kegiatan ini mampu menghemat anggaran sebesar Rp.15.375.314,-.

3 Meningkatkan Disiplin Aparatur

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur adalah sebagai berikut:

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	%	100	100	100

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran meningkatkan kedisiplinan aparatur cakupan objek yang diperiksa melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

Dari 1 (Satu) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, telah mencapai target yang telah ditetapkan.

4 Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan rencana adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
-	Bertambahnya ilmu pengdetahuan setelah mengikuti pendidikan dan latihan bagi PNS.	%	100	99,87	99,87

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran, Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur cakupan objek yang diperiksa melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Diklat Teknis Tugas dan Fungsi PNS.

Dari 1 (Satu) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, tidak mencapai target yang telah ditetapkan, ini disebabkan karena dalam rangka efisiensi anggaran.

5 Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran terlaksananya peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian sesuai dengan rencana adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
-	Tersedianya Laporan kinerja dan ihtisar kinerja SKPD (LAKIP).	Dok	1 Dok	100	100
-	Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun	Dok	1 Dok	99,67	99,67
-	Tersedianya laporan fisik dan keuangan	Dok	1 Dok	100	100

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran Meningkatkan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian, cakupan objek yang diperiksa melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Laporan Catatan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
- Penyusunan Realisasi Fisik dan Keuangan.

Dari 3 (Tiga) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, ada satu indikator yang tidak mencapai target yaitu Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. Target yang ditetapkan sebesar Rp.14.296.600,- namun yang terealisasi sebesar Rp. 14.249.600,- atau (99,67%). Kegiatan ini walaupun kegiatan fisiknya seratus persen namun realisasi keuangannya hanya mencapai (99,67%) ini disebabkan karena dalam rangka efisiensi anggaran.

6 Singkronisasi Perencanaan dan Penganggaran OPD

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran terlaksananya Singkronisasi Perencanaan dan penganggaran Pengelolaan Keuangan sesuai dengan rencana adalah sebagai berikut:

	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
-	Tersedianya RKA OPD sebagai rencana dalam pelaksanaan program dan kegiatan.	Dok	1 Dok	100	100
-	Tersedianya DPA OPD sebagai Acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan.	Dok	1 Dok	100	100
-	Tersedianya Renja OPD	Dok	1 Dok	100	100

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran Singkronisasi Perencanaan dan Penganggaran OPD. Cakupan objek yang diperiksa melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan RKA OPD.
- Penyusunan DPA OPD.
- Penyusunan Renja OPD.

Dari 3 (Tiga) indikator kinerja yang ditetapkan ketiga-tiganya mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

7

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Target dan capaian indikator keberhasilan sasaran terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan rencana adalah sebagai berikut:

	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
-	Meningkatnya penerimaan daerah dari sector PAD	%	100	100	100
-	Tersedianya sarana penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	%	100	85,74	85,74
-	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pajak	%	100	100	100
-	Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi Pegawai	%	100	100	100
-	Tersusunnya SPT Bulanan dan Tahunan	%	100	99,97	99,97
-	Terlaksananya Bimbingan Tehnis bendahara penerima OPD	%	100	99,80	99,80
-	Terlaksananya Rekonsiliasi dana bagi hasil pajak	%	100	100	100
-	Terlaksananya rekonsiliasi penerimaan daerah	%	100	100	100
-	Terlaksananya penyelesaian pajak dan retribusi daerah	%	100	99,79	99,79
-	Terlaksananya pendataan dan pemutakhiran data objek pajak dan retribusi daerah	%	100	99,79	99,79
-	Terlaksananya penagihan pajak dan retribusi daerah	%	100	100	100
-	Terlaksananya pengelolaan SPK dengan Baik dan Tepat Waktu	%	100	95,70	95,70
-	Terlaksananya pencetakan SKRD dan SKPD	%	100	98,23	98,23

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang telah berupaya mencapai target indikator kinerja sasaran Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah. Cakupan objek yang diperiksa melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pengadaan benda berharga.
- Monitoring dan Evaluasi PAD
- Penyuluhan perpajakan
- Peningkatana pelayanan administrasi pegawai.
- Penyusunan SPT bulanan dan Tahunan.
- Bimbingan Tehnis bendahara OPD.
- Rekonsiliasi dana bagi hasil.
- Rekonsiliasi penerimaan daerah
- Penyelesaian permasalahan Pajak dan retribusi Daerah.
- Pendataan dan Pemutakhiran objek Pajak dan retribusi daerah.
- Penagihan Pajak dan retribusi
- Pengelolaan SPK dan Pengurusan Program pembangunan.
- Percetakan dan penerbitan SKPD dan SKRD

Dari 13 (Tiga Belas) Indikator kinerja yang ditetapkan terdapat 7 (tujuh) indikator kegiatan yang tidak mencapai target. Ini disebabkan karena adanya item kegiatan perencanaan Anggarannya lebih besar dari apa yang telah dilaksanakan, serta dalam rangka efesiensi anggaran.

b. Strategi Pemecahan Masalah

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja di masa mendatang, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang menetapkan strategi-strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan lebih mengacu pada Renstra, Renja dan Propeda
- b. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pengelola kegiatan agar capaian kinerja dapat ditingkatkan.

- c. Menyempurnakan implementasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat.
- d. Memperluas upaya cakupan pengawasan pihak yang terkait.
- e. Meningkatkan Koordinasi antar OPD terkait dalam pengelolaan penerimaan daerah.

3. Analisis Atas Capaian Keuangan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun 2017.

APBD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, secara garis besar terdiri dari dua bagian yaitu, Pendapatan dan Belanja. Pendapatan diuraikan menurut sumber-sumber perolehan dana, sedangkan Belanja diuraikan menurut penggunaan dana.

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
I	PENDAPATAN			
1.	Pendapatan Asli Daerah	136.152.091.582,-	100.266.156.369,55	73,64
	JUMLAH PENDAPATAN	136.152.091.582,-	100.266.156.369,55	73,64
II	BELANJA			
1.	Belanja Langsung	5.170.087.370,-	4.987.027.175,-	96,46.
2.	Belanja Tidak Langsung	2.721.650.720,-	2.025.978.110,-	75
	JUMLAH BELANJA	7.891.738.090,-	7.013.005.285,-	88,86
	Surplus / Defisit		878.732.805,-	
III	PEMBIAYAAN			
1.	Penerimaan Pembiayaan	-	-	
2.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
	TOTAL PEMBIAYAAN	-	-	

Target dan realisasi atas capaian keuangan per masing-masing kegiatan di Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.236.100	22.236.100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,-	11.453.120,-	22,91
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.750.000,-	21.750.000,-	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangun Kantor	10.000.000,-	10.000.000,-	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	52.200.000,-	46.200.000,-	88,51
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	479.250.000,-	479.250.000,-	100
	Pelaksanaan Pelelangan / Pengadaan Barang dan Jasa	7.496.900,-	,7.496.900,-	100
	Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan Peninjauan Lapangan	130.470.000,-	130.470.000,-	100
	Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perkantoran	852.039.200,-	803.307.700,-	94,28
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Mobiler	195.800.000,-	192.367.000,-	98,25
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	195.000.000,-	186.000.000,-	96,38
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	26.375.000,-	26.375.000,-	100
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	53.500.000,-	38.424.686,-	71,82,-
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	50.000.000,-	50.000.000,-	100
Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	21.900.000,-	21.900.000,-	100
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Diklat Teknis Tugas dan Fungsi PNS	314.400.000,-	314.400.000,-	100
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.300.300,-	3.300.300,-	100
	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan	2.888.000,-	2.888.000,-	100

	Keuangan			
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	14.296.600,-	14.296.600,-	100
Singkronisasi Perencanaan dan Penggangan OPD	Penyusunan RKA OPD	4.180.200,-	4.180.200,-	100
	Penyusunan DPA OPD	4.175.800,-	4.175.800,-	100
	Penyusunan Renja OPD	3.300.000,-	3.300.000,-	100
Sinkronisasi Perencanaan dan Penggangan OPD	Pengadaan Benda Berharga	160.945.600,-	137.995.600,-	85,74
	Monitoring dan Evaluasi PAD	86.670,400,-	86.670,400,-	100
	Penyuluhan Perpajakan	125,311,900,-	125,311,900,-	100
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Pegawai	24,858.000,-	24.858.000,-	100
	Penyusunan SPT Bulanan dan Tahunan	17.892,500,-	17.892.500,-	100
	Bimbingan Teknis Bendahara OPD	76.592.000,-	76.592.000,-	100
	Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil	112.447.000,-	112.447.000,-	100
	Rekonsiliasi Penerimaan Daerah	85.102.900,-	85.102.900,-	100
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyelesaian Permasalahan Perpajakan	24.294.000,-	24.244.000,-	99,79
	Pendataan dan Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Retribusi Daerah	700.112.970,-	694.422.970,-	99,19
	Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	145,644,500,-	145.644.500,-	100
	Pengelolaan SPK dan Pengurusan Program Pembangunan	535.510.000,-	512.460.000,-	95,70
	Percetakan dan Penerbitan SKPD dan SKRD	560.147.500,-	550.217.500,-	98,23
	TOTAL	5.170.087.370,-	4.987.027.175,-	96,46

Berdasarkan atas hasil capaian keuangan realisasi kegiatan di tahun 2017, dapat di analisa bahwa Badan Pendapatan Daerah telah menggunakan anggaran sebesar 96,46%, atau dari total anggaran kegiatan Rp. 5.170.087.370,- terealisasi sejumlah Rp. 4.987.027.175,-

- Jumlah kegiatan terserap anggaran 100% : 20 Kegiatan
- Jumlah Kegiatan terserap anggaran 80 – 99,9% : 13 Kegiatan
- Jumlah kegiatan terserap anggaran 50 – 79,9% : 1 Kegiatan
- Jumlah terserap anggaran di bawah 50% : 1 Kegiatan
- Jumlah yang tidak terealisasi : - Kegiatan

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan kepada organisasi. Di sisi lain, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang secara umum telah berhasil mencapai target kinerja sasaran. Dari 7 (Tujuh) sasaran dengan 20 indikator yang telah ditetapkan umumnya mencapai kinerja sasaran secara memadai dengan angka rata-rata capaian 100%.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang telah menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan, peningkatan kemampuan pengelola kegiatan, penyempurnaan implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan atas pelaksanaan kegiatan.

Semoga laporan ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja sasaran dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan citra dan harapan pemerintah dan masyarakat.